

## ARAH KEBIJAKAN KERJA SAMA PERTANIAN INDONESIA DI KAWASAN ASIA PASIFIK

### *Policy Direction of Agricultural Cooperation of Indonesia in the Asia Pacific Region*

Hermanto

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia  
Korespondensi penulis. E-mail: manto\_her@yahoo.com*

Naskah diterima: 16 November 2018

Direvisi: 26 November 2018

Disetujui terbit: 10 Desember 2018

#### ABSTRACT

In the current globalization era, it can no longer be inevitable the importance of cooperation among countries to realize peace and mutual prosperity. One of the growing international collaborations in the Asia Pacific region is Association of South East Asian Nations (ASEAN) and Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). The idea of the agricultural cooperation importance is one of the efforts to respond to various challenges in free trade and globalization era where each country in the Asia Pacific region has its advantages and disadvantages. This paper aims to describe the readiness of Indonesia's agriculture and reviewing several international cooperation that built in the Asia Pacific region. With the use of the analysis framework based on the theories of international cooperation, showed that Indonesian agricultural sector still requires effort to empowerment because dominated by the small-scale businesses with limited capital and innovative technology, respectively. Most of the agricultural export products are also still needs the exertion of increase of its competitiveness. The cooperation in the Asia-Pacific region is very prospective. Trade and investment cooperation are more open in the Asia Pacific region will open market opportunities for agricultural products Indonesia thereby potentially encourage high economic growth and to increase the standard of life of the people of Indonesia and other countries in the Asia Pacific region. To create new opportunities and new markets in the Asia Pacific region, needed the policy direction covering four interrelated matters, namely how to improve access of agricultural commodity markets, increase investment, develop technical cooperation and strengthen diplomacy function as a factor of facilitating Indonesia facilitators in facing many agriculture collaborations for today and the future.

**Keywords:** *Agriculture, Asia-Pacific, Cooperation, Indonesia*

#### ABSTRAK

Di era globalisasi seperti sekarang ini, tidak dapat lagi dielakkan pentingnya menjalin kerja sama antarnegara dalam rangka mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bersama. Salah satu kerja sama internasional yang berkembang saat ini di kawasan Asia Pasifik adalah *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC). Pemikiran akan pentingnya menjalin kerja sama, khususnya di bidang pertanian merupakan salah satu upaya merespon berbagai tantangan di era globalisasi dimana masing-masing negara di kawasan Asia Pasifik memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tulisan ini bertujuan menganalisis kesiapan pertanian Indonesia serta mereview beberapa kerja sama internasional yang dibangun di kawasan Asia Pasifik. Dengan kerangka analisis yang didasarkan pada teori-teori kerja sama internasional, diperoleh gambaran bahwa sektor pertanian Indonesia masih memerlukan upaya pembenahan/ dan pemberdayaan karena usaha pertanian saat ini masih didominasi oleh usaha dengan skala kecil, modal yang terbatas, dan penggunaan teknologi yang masih sederhana. Sebagian besar produk ekspor pertanian juga masih memerlukan upaya peningkatan daya saing. Meskipun demikian prospek kerja sama di kawasan Asia-Pasifik sangat menjanjikan. Kerja sama perdagangan dan investasi yang lebih terbuka di kawasan Asia Pasifik akan membuka peluang pasar bagi produk pertanian Indonesia sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta meningkatkan standar hidup masyarakat Indonesia dan negara lainnya di kawasan Asia Pasifik. Untuk menciptakan peluang baru serta pasar baru di kawasan Asia, dibutuhkan adanya strategi mencakup empat hal yang saling terkait yakni bagaimana meningkatkan akses pasar, meningkatkan investasi, mengembangkan kerja sama teknik (*technical cooperation*) serta penguatan fungsi diplomasi pertanian sebagai faktor pelancar Indonesia dalam menghadapi berbagai kerja sama di bidang pertanian saat ini dan ke depan.

**Kata kunci:** *Pertanian, Asia-Pasifik, Kerja sama, Indonesia*

## PENDAHULUAN

Pada tataran global saat ini, isu-isu pertanian tidak lagi terbatas pada lingkup nasional, tetapi sangat terkait dengan isu-isu global, seperti krisis pangan dan energi, ancaman pandemik global, perubahan iklim dan sebagainya (Auzina-Emsina 2014). Karakter dari berbagai tantangan ini mengingatkan bahwa pendekatan dan solusi internasional harus terus diupayakan. Hal ini penting karena tidak ada satu pun bangsa yang mampu menangani berbagai tantangan tersebut sendiri, mengingat karakter tantangan yang dihadapi tidak dilandaskan pada batas negara (FAO 2017). Di era globalisasi, tidak dapat dielakkan pentingnya menjalin kerja sama antarnegara dalam rangka mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bersama. Kesadaran tersebut telah menumbuhkan banyak jenis kerja sama internasional, baik dalam bidang politik dan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun lingkungan. Semua ini didasarkan pada perhitungan mazhab *liberal institutional* mengenai adanya *positive sum game* dan *mutual benefit* antara aktor-aktor yang bekerja sama (Samphantharak 2011; Winarno 2014).

Salah satu kerja sama yang marak berkembang saat ini adalah organisasi regional berbasis kewilayahan. Di kawasan Asia Pasifik, misalnya ada dua organisasi yang dewasa ini telah menarik perhatian publik internasional karena perkembangannya, yakni *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dan *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) (Powers dan Goertz 2011; Anam 2014). Selain dua organisasi tersebut, akhir-akhir ini juga muncul perjanjian *Trans-Pacific Partnership* (TPP), namun tidak berlanjut setelah Amerika Serikat menyatakan keluar dari perjanjian TPP. Oleh karena itu, beberapa negara terus mendorong kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang dianggap dapat menjadi pengganti TPP. Perkembangan RCEP saat ini telah menjadi sorotan dunia pascastagnansi proses implementasi TPP.

Kerja sama ASEAN saat ini telah tumbuh sebagai entitas yang memiliki prinsip dan *sphere of influence* tersendiri. Hal ini pula yang mendorong pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Pembentukan MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan perpindahan barang modal secara lebih bebas (ASEAN 2017). Melalui MEA diharapkan ASEAN mampu meningkatkan daya saing serta bisa menyaingi

Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Hal yang serupa juga terlihat pada kerja sama APEC dimana pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang tergabung dalam APEC terus mengalami perbaikan dari 3,4% pada tahun 2016 menjadi 4,1% pada 2017. Prospek perbaikan ekonomi APEC tersebut ditopang oleh pemulihan kinerja perdagangan negara anggota. Hal ini terlihat dari nilai ekspor APEC pada 2017 tercatat sebesar 10,2% setelah berkontraksi 3,9% pada 2016. Volume ekspor dan impor masing-masing tumbuh 4,9% dan 7,8% pada tahun 2017. Sementara itu, perdagangan layanan komersial (*commercial services*) tumbuh lebih dari 5,0% pada tahun 2017 (APEC 2018).

Pemikiran pentingnya menjalin dan memperluas kerja sama di kawasan Asia Pasifik merupakan salah satu upaya merespon berbagai tantangan di era perdagangan bebas dan globalisasi. Pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat strategis untuk diperluas dan ditingkatkan kerja samanya dengan tujuan saling membantu dan mendukung memajukan sektor pertanian antarbangsa di kawasan Asia Pasifik. Apalagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga kerja sama yang terjalin diharapkan mampu meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di kawasan Asia Pasifik. Tulisan ini akan menganalisis kesiapan pertanian Indonesia dalam kerja sama internasional di kawasan Asia Pasifik. Tulisan ini akan mereview beberapa kerja sama internasional pertanian yang dilakukan Indonesia selama ini di kawasan Asia Pasifik. Dengan kerangka analisis yang didasarkan pada teori-teori kerja sama internasional, selanjutnya akan disintesis untuk menentukan arah kebijakan kerja sama pertanian Indonesia di kawasan Asia Pasifik.

## TINJAUAN TEORITIS KERJA SAMA INTERNASIONAL

Terdapat banyak teori yang dapat menjelaskan kerja sama internasional. Diantaranya adalah teori realisme, teori neoliberalisme, dan teori marxisme. Teori realisme dikembangkan lebih dipengaruhi oleh situasi yang melatarbelakanginya, yaitu Perang Dunia I dan II. Teori realisme melihat bahwa negara-negara adalah aktor-aktor rasional yang berusaha mencari kekuasaan dan tertarik kepada kepentingan diri sendiri (*self-interested*). Setiap kerja sama antara negara-negara dijelaskan sebagai benar-benar insidental. Hal

ini didasarkan pada pandangan bahwa kerja sama internasional berangkat dari adanya konflik kepentingan, antarnegara maupun antarmasyarakat yang sebagian masyarakat memiliki kelebihan dari yang lain. Para realis melihat Perang Dunia II sebagai pembuktian terhadap teori mereka. Menurut para pendukung realisme bahwa titik tolak kepentingan negara tidak hanya kepentingan nasional namun juga lingkungan sistemiknya sehingga terjadi adanya distribusi atau polarisasi kekuatan (*distribution of power*) di antara negara-negara. Hubungan internasional tersebut merupakan situasi anarki yang terdiri dari negara-negara yang beragam dalam hal kekuatan atau kapabilitas relatifnya.

Teori neoliberalism dikembangkan oleh John Burton, David Mitrany, Ernst B. Haas, Robert Keohane, dan Joseph S. Nye. Teori ini muncul setelah Perang Dunia I untuk menanggapi ketidakmampuan negara-negara untuk mengontrol dan membatasi perang dalam hubungan internasional mereka. Burton (1972) mengajukan model jaring laba-laba dalam kerja sama internasional yang menunjukkan kondisi negara-negara Eropa Barat yang terdiri banyak kelompok masyarakat berbeda dan memiliki tipe hubungan eksternal dan tipe kepentingan yang berbeda pula. Hubungan antarnegara Barat tersebut dicorakkan oleh Interdependensi Kompleks. Ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama. Para pendukung neoliberalisme percaya bahwa tidak hanya faktor produksi, konsumsi, dan distribusi yang tunduk pada hukum pasar, tetapi seluruh aspek kehidupan.

Teori marxisme menolak pandangan realis/liberal tentang konflik atau kerja sama negara, tetapi sebaliknya berfokus pada aspek ekonomi dan materi. Para pendukung marxis memandang sistem internasional sebagai sistem kapitalis terintegrasi yang mengejar akumulasi modal (*capital*). Dengan demikian, periode kolonialisme membawa masuk pelbagai sumber daya untuk bahan-bahan mentah dan pasar-pasar yang pasti (*captive markets*) untuk ekspor, sementara dekolonisasi membawa masuk pelbagai kesempatan baru dalam bentuk dependensi (ketergantungan). Hubungan ketergantungan pada umumnya adalah hubungan metropolis-satelit dalam suatu sistem kapitalisme dunia yang dicirikan oleh sifat monopolistik dan ekstraktif. Teori marxisme ini

berkembang menjadi sebuah teori mengenai pembangunan, yaitu *core* dan *periphery* saling berposisi di dalam formasi sosial kapitalis di daerah dan memblokir pembangunan di daerah *periphery*.

Perkembangan teori kerja sama internasional selanjutnya adalah munculnya pendekatan aliran neomarxisme. Teori ini tidak menggunakan negara atau lembaga internasional sebagai satuan analisis tapi memusatkan pada kelas-kelas. Aktor-aktor lain dalam politik global seperti negara, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional hanya merepresentasikan kepentingan suatu kelas tertentu dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini konteks perkembangan kapitalisme global sifatnya eksploitatif dan menciptakan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. Dalam rangka mempertahankan kepentingan dominasi ekonominya, negara-negara kaya yang mewakili kepentingan kelas kapitalis akan menggunakan lembaga-lembaga pembangunan dan keuangan internasional untuk menekan negara-negara berkembang agar memfasilitasi operasi kapital global di negara masing-masing.

Mengacu pada beberapa teori kerja sama internasional tersebut maka esensi dari kerja sama internasional adalah interaksi antara satu negara dengan negara lain yang sama-sama memiliki kepentingan nasional masing-masing seperti ekonomi, keamanan, pertahanan, dan militer (Sangit 2012). Dalam perkembangannya, hubungan kerja sama antarnegara diyakini dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut (Schouenborg dan Buzan 2018). Konsep ini muncul didasari dari adanya pemikiran Holsti (1994) yang mendefinisikan kerja sama internasional sebagai berikut: (1) pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus; (2) pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya; (3) persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan; (4) aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan; dan (5) transaksi antarnegara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Holsti menekankan bahwa kerja sama internasional tidak hanya dilakukan antar negara secara individual, tetapi dilakukan juga antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerja sama dengan negara lainnya: (1) demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, melalui kerja sama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut; (2) untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya; (3) karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama; dan (4) dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberikan dampak terhadap negara lain. Untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara maka kerja sama internasional yang dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerja sama seperti yang diharapkan. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen.

### ARAH KERJA SAMA INTERNASIONAL INDONESIA

Kerja sama internasional dapat dirasakan lebih dekat manfaatnya karena bersifat lokal-internasional. Bisa dikatakan bahwa bentuk kerja sama ini adalah praktek dari konsep *think globally, act locally*. Kerja sama ini bisa juga dikatakan sebagai “pembumian” dari konsep hubungan internasional yang sangat luas dan besar. Kerja sama sangat dibutuhkan, perkembangan dan masa depan negara akan menjadi lebih sulit bila menutup dirinya untuk tidak mengadakan kontak kerja sama dengan negara lain. Bentuk-bentuk kerja sama antar negara dapat digolongkan sebagai berikut: (1) Kerja sama bilateral, merupakan kerja sama antardua negara. Misalnya, kerja sama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Singapura atau Amerika dengan Arab Saudi. Kerja sama bilateral bertujuan untuk membina hubungan yang telah ada serta menjalin hubungan kerja sama perdagangan dengan

negara mitra; (2) Kerja sama regional, merupakan kerja sama antara negara-negara sewilayah atau sekawasan. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan perdagangan bebas antara negara di suatu kawasan tertentu; dan (3) Kerja sama multilateral, merupakan kerja sama yang dilakukan lebih dari dua negara tanpa batas kawasan atau wilayah, seperti PBB, WTO, dan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Bagi Indonesia, kerja sama internasional sangat dibutuhkan demi terciptanya suatu negara yang sejahtera. Dalam berinteraksi dengan negara lain, Indonesia memiliki 3 (tiga) landasan utama, yaitu *landasan idil, konstitusional, dan operasional* (Nabs-Keller 2013). Ketiga landasan tersebut menjadi pilar yang dipegang teguh sebagai panutan bangsa Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain. *Landasan idil* adalah Pancasila sebagai dasar negara, sumber dari segala hukum dan konstitusi di Indonesia. *Landasan konstitusional* adalah berupa Undang – Undang Dasar 1945, yakni kehidupan berbangsa dan bernegara telah diatur di dalamnya termasuk penentuan kebijakan luar negeri Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional. Selanjutnya, untuk *landasan operasional* senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional, namun tetap mengacu pada politik bebas-aktif, yakni menekankan pada sikap netral dan tidak memihak terhadap pihak manapun saat terjadi pertentangan dan menghindari intervensi serta semangat menjalin kerja sama dan hubungan baik dengan negara lain.

Peran dan keberadaan Indonesia dalam hubungan internasional saat ini makin berkibar sehingga berbagai peluang perlu dimanfaatkan untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan antar bangsa, yang pada akhirnya ditujukan bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Arah kerja sama internasional Indonesia tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Di dalam RPJMN 2015-2019, sasaran utama yang ingin dicapai dalam pembangunan kerja sama internasional adalah meningkatnya konsistensi Indonesia dalam melaksanakan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dan jati dirinya sebagai negara maritim untuk mewujudkan tatanan dunia yang makin baik dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia. Rincian sasarannya adalah sebagai berikut: (1) tersusunnya karakter kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dan (2) menguatnya diplomasi maritim untuk

mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/ kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim, yang ditempuh melalui strategi: (a) evaluasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan penyusunan buku biru diplomasi yang menggambarkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dan melaksanakan UU No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) secara konsisten; (b) penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut, riset strategis, dan perdagangan; (c) konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara regular untuk melaksanakan kebijakan polugri yang berkarakter bebas aktif, sesuai kepentingan nasional dan jati diri negara maritim; (d) Perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi; (e) pengembangan IT Masterplan untuk mendukung diplomasi RI.
2. Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga.

Sasaran tersebut di atas memperlihatkan bahwa Indonesia sangat berkeinginan meningkatkan perannya di tingkat global. Disamping kerja sama global, seperti diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, terdapat poin penting lainnya dalam kebijakan kerja sama luar negeri Indonesia, yaitu meningkatnya pelaksanaan kerja sama pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Kerja sama ini diharapkan bukan hanya atas dasar pertimbangan keuntungan politis tetapi juga keuntungan ekonomis yang pada gilirannya dapat menunjang pembangunan nasional (Andika 2016; Alvian et al. 2018).

## KERJA SAMA INTERNASIONAL PERTANIAN INDONESIA

Kawasan Asia-Pasifik adalah kawasan yang memiliki nilai penting dalam kegiatan dunia karena dilihat dari lokasi geografis dapat memengaruhi kebijakan strategi dan kekuatan suatu negara yang ingin mencapai kepentingan nasionalnya. Kawasan Asia Pasifik dipandang sebagai kawasan yang paling cocok untuk memahami pentingnya peran dalam membangun interaksi yang sifatnya multilateral. Kerja sama internasional yang dilakukan Indonesia di kawasan Asia Pasifik meliputi banyak bidang, yaitu perdagangan, *capacity building*, dan pertukaran tenaga ahli dengan negara-negara maju guna membantu pengembangan di bidang-bidang tertentu. Namun, pada tulisan ini akan difokuskan pada beberapa kerja sama perdagangan dan *capacity building*.

Di negara seperti Fiji, Timor Leste, Papua Nugini, dan Vanuatu, Indonesia aktif memberikan kontribusi untuk pengembangan sektor pertaniannya. Bantuan yang diberikan Indonesia kepada sejumlah negara di kawasan Pasifik berupa alat dan mesin pertanian dan *capacity building*. Bantuan Indonesia tersebut mendapat pengakuan dari berbagai lembaga internasional dan negara-negara lain di dunia (Davies dan Harris 2016; Fealy dan White 2016). Kerja sama yang telah berjalan di kawasan Asia Pasifik selama ini tidak hanya dalam bentuk pemberian bantuan tetapi juga melalui peningkatan kerja sama perdagangan terutama untuk komoditas-komoditas pertanian (Santikajaya 2016). Hal ini berarti posisi Indonesia sebagai *middle-income country* dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan volume perdagangan dengan beberapa negara di kawasan Pasifik.

Dengan Jepang, misalnya kerja sama penanganan pascapanen, *shape treatment* untuk beberapa hama seperti lalat dan lainnya karena produk yang ingin masuk ke pasar Jepang harus memenuhi syarat dan ketentuan bebas dari hama tersebut. Indonesia juga melakukan kerja sama dengan Amerika Serikat yang menginginkan produk kakao Indonesia memenuhi standar-standar tertentu. Di bidang peternakan, kerja sama dilakukan dengan Australia untuk membantu mengembangkan bibit unggul yang dapat beradaptasi dengan iklim di Indonesia. Demikian halnya dengan New Zealand, Brazil, Paraguay, dan Uruguay sebagai negara yang sudah maju dalam bidang peternakan, Indonesia juga melakukan kerja sama.

Kerja sama internasional yang dikembangkan Indonesia di bidang pertanian tidak terlepas dari potensi sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia telah lama dikenal sebagai negara produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia, produsen karet alam terbesar kedua setelah Thailand, penghasil kakao terbesar ketiga setelah Pantai Gading dan Ghana, produsen kopi terbesar ketiga setelah Brazil dan Kolombia, serta produsen dan konsumen beras terbesar ketiga di dunia. Selain komoditas perkebunan, masih banyak hasil-hasil pertanian Indonesia yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk pasar ekspor. Indonesia juga terus menyiapkan diri sebagai penyedia sumber pangan di wilayah perbatasan, khususnya bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Nugini (PNG), Timor Leste, Republik Palau, Australia dan lainnya (Hermanto et al. 2017).

Wilayah perbatasan negara mempunyai nilai strategis dan akan menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga yang dapat memberikan efek positif bagi peningkatan keamanan, kesejahteraan, dan sekaligus pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan. Selain itu, Indonesia berpotensi menjadi sumber pangan organik dunia, khususnya beras organik. Selama ini beras organik diekspor ke negara Singapura, Hongkong, Thailand, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Belgia. Komoditas pangan lainnya seperti beras ketan hitam juga diekspor ke negara Singapura, dan Hongkong. Komoditas singkong diekspor ke negara China, Korea, dan Eropa. Bahkan, Indonesia saat ini dikenal sebagai produsen singkong terbesar ketiga di Dunia setelah Nigeria dan Thailand.

Untuk komoditas hortikultura seperti buah manggis diekspor ke negara Thailand, Malaysia, Hongkong, Selandia Baru, Vietnam, China. Nilai ekspor manggis diketahui sebagai penyumbang devisa terbesar pada tahun 2015 dengan nilai ekspor sebesar US\$ 17.212.084. Buah mangga juga merupakan penyumbang devisa terbesar ke-2 dengan nilai ekspor pada tahun yang sama sebesar US\$ 1.820.607. Negara tujuan ekspor mangga adalah Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, Hongkong, Bahrein, Saudi Arabia, dan Qatar. Untuk ekspor pisang segar pada tahun 2016 mencapai 17,4 juta ton dengan negara tujuan Timur Tengah, Malaysia, Iran, China, Jepang, dan Korea Selatan. Buah salak diekspor ke China, Malaysia, Singapura, Kamboja; melon: Singapura, Hongkong, Australia; nanas olahan (kemasan kaleng)

diekspor ke negara USA, Eropa, Timur Tengah, Amerika Latin (Peru, Uruguay, Panama), India, dan Asia Pasifik (Kementan 2017).

Untuk berbagai komoditas sayuran seperti kubis telah menjadi primadona di pasar ekspor dengan pangsa pasar mencapai 35,2% dari total ekspor sayuran Indonesia. Nilai ekspor kubis saat ini lebih besar dibandingkan komoditas sayur daun lainnya, yaitu senilai US\$ 5,8 juta dengan negara tujuan Taiwan, Singapura, Malaysia, dan Christmas Islands, China, Hongkong, Brunei Darussalam, Korea, Jepang, dan Thailand. Untuk cabai segar diekspor ke negara Jepang, Hongkong, Korea, Taiwan, China, Papua Nugini, Thailand, Singapore, Philipines, Malaysia, Myanmar, dan lainnya. Demikian halnya paprika diekspor ke Taiwan dan Singapura; sayuran organik (caisin, wortel) ke Singapura dan Malaysia; *Baby* buncis: Jerman, Singapura, dan Malaysia. Untuk jenis sayuran lainnya di ekspor ke Jepang, Singapura, Malaysia, Vietnam, Saudi Arabia, Belanda, dan lainnya (Kementan 2017).

Untuk komoditas florikultura seperti anggrek dan krisan juga diekspor ke berbagai negara. Anggrek, misalnya di ekspor ke Jepang sebesar 16,64 ton pada tahun 2015. Anggrek juga diekspor ke Singapura, Hongkong, Australia, dan Taiwan. Untuk krisan volume ekspornya juga terus meningkat dari 56,23 ton pada tahun 2014 menjadi 59,63 ton pada tahun 2015 atau meningkat sebesar 6,05%. Negara pengimpor krisan terbesar dari Indonesia adalah Jepang dengan volume ekspor 53,34 ton, kemudian diikuti dengan negara lainnya seperti Singapura, Jerman, Inggris, Swiss, dan Italia. Demikian pula untuk tanaman obat seperti temulawak, kunyit, dan jamu (produk olahan) juga banyak diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, India, dan Jerman (Kementan 2017).

Untuk komoditas peternakan sudah mulai memiliki peluang ekspor, seperti ekspor telur ayam tetas (*hatching eggs*) ke negara Myanmar sejak tahun 2015. Bahkan, sejak 2014 Indonesia mengupayakan untuk mengeksport hasil daging ayam ke Jepang (Kementan 2017). Pemerintah Jepang telah menyetujui 4 (empat) unit usaha pengolahan daging ayam untuk mengeksport daging ayam olahan ke negaranya. Keempat unit usaha tersebut yaitu: (1) PT. Malindo Food Delight Plant di Bekasi; (2) PT. So Good Food Plant di Cikupa; (3) PT. Charoen Pokphand Plant di Serang, dan (4) PT. Bellfood Plant di Gunung Putri. Daging ayam olahan yang akan diekspor adalah yang telah melalui proses pemanasan  $\geq 70^{\circ}\text{C}$  selama  $\geq 1$  menit. Hal ini dilakukan karena Indonesia saat ini masih belum bebas dari penyakit *Avian*

*Influenza* (AI). Sebelum tahun 2003, Indonesia telah mengeksport daging ayam segar dingin dan beku ke beberapa negara, antara lain Jepang dan Timur Tengah. Namun, dengan munculnya wabah Penyakit AI pada tahun 2003 menyebabkan pasar ekspor daging ayam Indonesia terhenti.

Produk peternakan lainnya yang diekspor diantaranya susu cair pasteurisasi, yaitu susu bantal *Real Good* ke Myanmar mulai tahun 2017; semen beku ke Kirgistan, Malaysia, Myanmar, Timor Leste, dan Palestina; vaksin obat hewan diekspor ke Bangladesh, Belgia, China, Kroasia, Perancis, Georgia, Jerman, dan lainnya. Khusus untuk produk pangan asal hewan, seperti susu, bakso, *artificial flavour*, makanan/minuman yang mengandung telur diekspor ke Irak, Israel, Kuwait, Lebanon, UEA, Yordania, India, Australia, dan lainnya. Nilai ekspor produk-produk tersebut tercatat meningkat dari USD\$ 98.251.930 pada tahun 2015 menjadi USD\$ 122.798.140 pada tahun 2016 atau meningkat sebesar 24,98% (Kementan 2017).

Dinamika perkembangan ekonomi global akhir-akhir ini memberikan sinyal akan pentingnya upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Perhatian terhadap nilai tambah dan daya saing sangat relevan jika dikaitkan dengan arus liberalisasi perdagangan yang makin tinggi tingkat persaingannya antarnegara. Pemikiran akan pentingnya menjalin kerja sama yang lebih erat lagi dalam proses integrasi ekonomi menuntut adanya kesiapan sektor pertanian Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional di kawasan Asia Pasifik. Dengan kerja sama internasional yang solid dan intens dibidang pertanian, diharapkan Indonesia mampu memegang kendali, bukan menjadi marjinal di kawasannya.

### **KESIAPAN PERTANIAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INTERNASIONAL**

Dengan segala potensi sumber daya alam yang sangat besar dan letak geografis serta iklim tropisnya, seharusnya Indonesia mampu mengoptimalkan kerja sama pertanian di kawasan Asia Pasifik. Namun, realitasnya, sektor pertanian Indonesia masih harus banyak dibenahi untuk mampu bersaing secara internasional. Usaha pertanian Indonesia masih didominasi oleh usaha dengan: (a) skala kecil; (b) modal yang terbatas; (c) penggunaan teknologi yang masih sederhana; (d) produksi

sangat dipengaruhi oleh musim; (e) wilayah pasarnya lokal; (f) umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi); dan (g) akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah. Selain itu, berbagai persoalan yang terkait dengan konversi lahan, perubahan iklim, dan lainnya juga belum terselesaikan dengan baik.

Demikian halnya dengan kapasitas produksi cenderung makin menurun. Kapasitas produksi pertanian, selain memang rendah sejak awal, juga mengalami kelelahan sistematis karena pola budi daya, lingkungan tumbuh, dan inefisiensi skala produksi usaha tani (Arifin 2011). Hal ini juga terlihat dari hasil proyeksi 2016 - 2035 untuk beberapa komoditas pertanian strategis, seperti beras, jagung, gula, bawang merah, cabai merah, dan daging sapi menunjukkan bahwa laju peningkatan konsumsi diperkirakan akan meningkat lebih besar dibandingkan dengan laju peningkatan produksinya. Demikian halnya produksi dari masing-masing komoditas tersebut meningkat lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan jumlah konsumsi (Hermanto et al. 2017). Kondisi ini diperparah dengan adanya keterbatasan petani sebagai pelaku utama dalam mengelola dan memodifikasi lingkungan biofisik dan sosial ekonomi sistem produksi pertanian.

Dilihat dari daya saing komoditas, baru sebagian komoditas pertanian Indonesia yang mampu bersaing di pasar global, antara lain kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan lada. Sebagian besar produk ekspor pertanian tersebut masih memerlukan upaya peningkatan daya saingnya karena masih tertinggal dibandingkan dengan negara Vietnam dan Malaysia untuk produk-produk yang sama. Untuk komoditas pertanian strategis seperti: padi/beras, jagung, cabai merah, daging sapi, dan gula tebu umumnya hanya memiliki keunggulan komparatif. Sementara untuk komoditas bawang merah tidak memiliki keunggulan komparatif (Hermanto et al. 2017). Hal ini mengisyaratkan bahwa komoditas pertanian strategis hanya memiliki daya saing (keunggulan) potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Keunggulan komparatif tersebut masih dapat diwujudkan menjadi keunggulan kompetitif sepanjang mampu meningkatkan efisiensi produksi.

Karakteristik petani juga memperlihatkan fakta yang kurang menggembirakan. Jumlah petani gurem, yaitu keluarga petani yang menguasai lahan kurang

dari 0,5 ha, sekitar 31,17 juta. Jumlah tersebut menurun bila dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 26,13 juta (BPS 2014a). Kondisi ini menunjukkan terjadinya pengurangan jumlah petani sebesar 5,04 juta yang umumnya adalah petani tanaman pangan atau hampir berjumlah 75%. Selain kuantitas, mayoritas umur petani adalah kelompok menjelang usia senja yang masih bekerja. Sensus pertanian 2013 menyebutkan, struktur usia petani didominasi oleh petani tua dengan tingkat pendidikan rendah, yaitu 60,8% usia petani di atas 45 tahun dengan 73,97% berpendidikan setingkat SD (BPS 2014b). Data itu sejalan dengan hasil penelitian Koalisi Rakyat untuk Keadaulatan Pangan (KRKP) pada tahun 2015, menunjukkan bahwa struktur umur petani di Indonesia sebagian besar sudah tua dengan jumlah 60,8% berada pada usia di atas 45 tahun. Sumaryanto et al. (2015) juga mencermati fenomena penuaan petani (*aging farmer*) terjadi di semua tipe agroekosistem, yaitu lebih dari 70% petani berusia 40 tahun ke atas, bahkan yang usianya di atas 50 tahun lebih dari 40%.

Kategori umur tersebut mengindikasikan bahwa petani Indonesia memasuki fase masa pensiun dalam pelaksanaan pekerjaannya. Apabila dianggap umur produktif sampai 55 tahun maka kelompok petani yang ada saat ini adalah kelompok yang hanya menyisakan beberapa tahun saja untuk pensiun. Artinya, pada tahap ini, petani kurang memiliki kemampuan secara fisik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan usaha tani. Fenomena perubahan struktural tenaga kerja pertanian tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi sudah menjadi isu di tingkat global. Di Amerika Serikat, misalnya kecenderungan meningkatnya umur petani sudah dapat dilihat sejak tahun 1940 sampai tahun 2007, yakni rata-rata umur petani di Amerika Serikat meningkat dari 48 tahun pada tahun 1940 menjadi 57 tahun pada tahun 2007 (Kauffman 2013). Fenomena *aging farmer* juga terjadi di negara lain seperti Australia, Jepang, Uni Eropa, Thailand, Vietnam, Korea, dan Kanada (Murphy 2012; Uchiyama 2014). Meskipun demikian, permasalahan ini seringkali belum dipandang serius dibandingkan dengan permasalahan lainnya, seperti isu penurunan produksi karena perubahan iklim. Perhatian terhadap masalah perubahan struktur tenaga kerja pertanian ini perlu ditingkatkan karena penurunan jumlah petani dan fenomena penuaan petani bukan masalah baru.

Di sisi lain, regenerasi petani masih berjalan sangat lambat. Generasi muda makin kurang tertarik untuk bekerja di sektor pertanian.

Berbagai alasan penyebab menurunnya minat tenaga kerja muda, selain pertanian merupakan pekerjaan kasar dan rendahnya tingkat upah, juga terbatasnya penguasaan lahan pertanian, serta rendahnya *skill* budi daya dan pascapanen. Kurang minatnya generasi muda ke sektor pertanian secara nyata juga terlihat dari penurunan jumlah tenaga kerja yang terjadi pada kelompok umur pemuda, yaitu antara usia 15-29 tahun, dengan rata-rata pengurangan 3,41% per tahun. Kondisi ini berbeda dengan periode 2005-2009 ketika tenaga kerja di sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 0,64%. White (2011) menyebutkan ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan orang muda beralih dari pertanian: (1) menghilangnya keahlian dan pengetahuan mengenai pertanian di kalangan pemuda perdesaan (*de-skilling youth*); (2) menurunnya persepsi mengenai pertanian dan hidup di perdesaan; dan (3) abainya pemerintah terhadap pertanian skala kecil dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Hilangnya pemuda dari sektor pertanian di perdesaan dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan desa, terancamnya ketahanan pangan, dan tidak terserapnya jumlah tenaga muda dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pengangguran usia muda (pemuda pengangguran). Dalam hal inilah krisis tenaga muda di sektor pertanian akan memicu persoalan ketenagakerjaan yang lebih kompleks.

Fenomena perubahan struktural tenaga kerja pertanian saat ini merupakan bagian dari proses 'proletarisasi petani', yaitu proses eksodus petani dari lahan pertanian menuju nonpertanian. Kondisi inilah yang kemudian menciptakan gambaran pertanian di Indonesia yang disebut dengan 'pertanian senja' yaitu pertanian yang hanya ditekuni oleh mereka yang rata-rata sudah berumur dengan tingkat kualitas SDM yang rendah. Fenomena seperti ini perlu mendapat perhatian karena makin menurunnya jumlah petani akan berkorelasi positif dengan jumlah output yang dihasilkan.

Seperti negara berkembang lainnya, prospektif pertanian Indonesia akan sangat ditentukan oleh keberhasilan memberdayakan pertanian skala kecil karena lebih dari 90% petani Indonesia adalah petani kecil. Peluang dan ancaman terpenting berasal dari: (i) implikasi perdagangan bebas dan penciptaan blok-blok perdagangan dan (ii) implikasi dari perubahan iklim. Secara teoritis, penciptaan perdagangan bebas dan penciptaan blok-blok perdagangan akan meningkatkan efisiensi karena pasar bebas hanya akan efektif apabila pihak yang terlibat bisa menghasilkan produk



dan mendistribusikannya dengan efisien. Namun dalam kenyataannya, apa yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Bukti mengenai dampak perdagangan bebas terhadap pertanian di negara berkembang menunjukkan hasil yang beragam (Itakura 2014; Tam 2018).

Di Indonesia, misalnya perdagangan bebas di sektor pertanian telah membuat pembangunan sektor pertanian menjadi terhambat. Keadaan ini disebabkan oleh persaingan yang sangat ketat dari produk-produk pertanian sejenis yang diimpor. Produk pangan dalam negeri umumnya masih kalah bersaing dengan produk pangan impor. Impor pangan Indonesia diperkirakan akan makin besar pada masa mendatang karena tidak adanya proteksi dari pemerintah, seperti dengan dipermudahkannya tata niaga impor, dihapuskannya monopoli Bulog sebagai importir tunggal, serta dibebaskannya bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) beberapa komoditi pangan. Subsidi ekspor yang dilakukan oleh negara maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa, juga membuat pangan impor makin menguasai pasaran dalam negeri.

Dalam konteks perubahan iklim, Indonesia termasuk wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, dan suhu udara, serta peningkatan kejadian iklim ekstrim berupa banjir dan kekeringan merupakan beberapa dampak serius perubahan iklim yang dihadapi Indonesia. Perubahan iklim dengan segala penyebabnya secara faktual sudah terjadi di tingkat lokal, regional, maupun global. Tren perubahan ini tentunya sangat berkaitan dengan sektor pertanian. Oleh karena itu, strategiantisipasi dan teknologi adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan aspek kunci yang harus menjadi rencana strategis dalam rangka menyikapi fenomena perubahan iklim. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pertanian yang tahan (*resilience*) terhadap variabilitas iklim.

Di sisi lain, kekuatan ataupun kelemahan pertanian di Indonesia terkait dengan skala perusahaan, penguasaan teknologi prapanen dan pascapanen, permodalan, manajemen produksi, dan pemasaran. Keberhasilan dalam pemberdayaan pertanian skala kecil akan berdampak pada pembangunan dalam konteks yang lebih luas dari eksistensi pertanian itu sendiri karena berimplikasi langsung pada ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan sosial budaya suatu bangsa. Oleh sebab itu, upaya pemberdayaan pertanian skala kecil tidak hanya

berkenaan dengan peningkatan produktivitas, produksi, mutu, dan daya saing produknya di pasar lokal – nasional – global; namun mencakup pula aspek-aspek sosial ekonomi dan kelembagaan yang kondusif untuk meningkatkan pendapatan, harkat, dan martabat petani dalam eksistensinya sebagai bagian dari bangsa ini.

## PROSPEKTIF DAN TANTANGAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

Dinamika perkembangan kerja sama internasional di kawasan Asia Pasifik sangat menjanjikan. Di Asia Tenggara, misalnya sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota ASEAN telah melakukan berbagai kerja sama internasional. ASEAN tidak hanya dipandang sebagai organisasi regional yang aktivitasnya merupakan kepanjangan kebijakan dari negara-negara Asia Tenggara itu sendiri. Namun, ASEAN telah mampu memperluas kerja sama melalui pembentukan ASEAN *Plus Three* (APT) yang mulai diinisiasi pada akhir 1997. ASEAN *Plus Three* (APT) terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan Jepang (*Japan*), China (*the People's Republic of China*), serta Korea Selatan (*the Republic of Korea*).

Kerja sama APT difungsikan sebagai sarana untuk memperluas basis kerja sama perdagangan, perekonomian, serta keamanan kawasan (ASEAN 2017). Selain itu, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN juga membentuk *Free Trade Area* (FTA) yang pertama kalinya pada tahun 2002. Dalam perkembangannya, ASEAN FTA melakukan kerja sama dengan China (ASEAN-China FTA) pada tahun 2004, dengan Korea (ASEAN-Korea FTA) pada tahun 2007, dengan India (ASEAN-India FTA) pada tahun 2010, dengan Australia dan Selandia Baru (ASEAN-Australia-New Zealand FTA) pada tahun 2010, dengan Jepang (ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership*) pada tahun 2010, dengan ASEAN-India *Free Trade Area* (AIFTA) pada tahun 2010, dan dengan ASEAN Hongkong China (AHKCFTA) pada tahun 2014 yang implementasinya diperkirakan pada tahun 2019 (Hidetaka 2005; Egberink dan van der Putten 2010; Bano et al. 2013; Nguyet dan Vallée 2016; Orcalli 2017).

Dalam skema kerja sama ASEAN *Plus Three* telah dilaksanakan 2 (dua) proyek sejak tahun 2004 – 2008, yaitu *East Asia Emergency Rice Reserves* (EAERR) dan *ASEAN Food Security*

*Information System* (AFSIS). Kegiatan EAERR terutama difokuskan pada implementasi mekanisme pengadaan beras (*stock release mechanism*) dan pemanfaatan cadangan beras darurat untuk kondisi bencana. Sementara itu, kegiatan AFSIS difokuskan pada pembuatan jaringan informasi mengenai ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam proyek AFSIS, sebuah *website* telah dibentuk yang memberikan informasi mengenai situasi dan perencanaan kebijakan ketahanan pangan di kawasan ASEAN juga membentuk *ASEAN General Guidelines on the Preparation and Handling of Halal Food* sebagai upaya memperluas perdagangan daging dan produk daging intra-ASEAN. ASEAN juga telah membuat daftar hama endemik untuk beberapa komoditas pertanian yang diperdagangkan di kawasan, yaitu padi giling, jeruk (*citrus*), mangga, kentang, dan anggrek potong *dendrobium*. Upaya harmonisasi *phytosanitary* untuk komoditas-komoditas tersebut akan terus dilanjutkan khususnya untuk pengembangan panduan importasi. *ASEAN Plant Health Cooperation Network* (APHCN) juga telah dibentuk sebagai sarana untuk berbagi informasi mengenai kesehatan tanaman di negara-negara anggota ASEAN.

Untuk meningkatkan pengetahuan pekerja dan petani, ASEAN juga telah melaksanakan berbagai aktivitas, di antaranya: *Regional Training on Edible and Medicinal Mushroom Production Technology for ASEAN Extension Workers and Farmers* serta pertukaran pejabat, pelatih dan petani. Di bidang penelitian, sejumlah aktivitas telah dilakukan, seperti pembentukan *ASEAN Agricultural Research and Development Information System* (ASEAN ARDIS), *ASEAN Directory of Agricultural Research and Development Centres in ASEAN*, dan *Guidelines for the Use of the Digital Information System*.

Selain kerja sama ASEAN, kerja sama APEC juga berkembang pesat. Dalam kerangka kerja sama APEC, isu pembentukan *Free Trade Area of the Asia-Pacific* (FTAAP) makin menguat dan menjadi salah satu isu terpenting sejak disepakatinya *The Beijing Roadmap for APEC's Contribution to the Realization of the FTAAP* tahun 2014. *Roadmap* ini merupakan titik tolak bagi APEC untuk memulai proses upaya mewujudkan pembentukan FTAAP. FTAAP merupakan salah satu upaya APEC meningkatkan integrasi ekonomi regional dan capaian deklarasi *Bogor Goals*, yaitu penciptaan perdagangan dan investasi yang terbuka. Pembentukan FTAAP diperkirakan akan meningkatkan *market size* sebesar 41% dari

populasi dunia, membentuk 58% dari GDP dunia, dan 45% dari perdagangan dunia yang lebih besar dibandingkan dengan *Trans-Pacific Partnership* (TPP) maupun RCEP (APEC 2018).

Pembentukan FTAAP secara signifikan akan menurunkan tarif dalam ekonomi APEC yang dianggap akan memberikan efek positif terhadap perdagangan dan investasi (APEC 2018). Pembahasan FTAAP dalam forum APEC terus bergulir dan mengarah kepada realisasi. Untuk itu, penyusunan posisi Indonesia yang kuat dan disepakati secara nasional dengan melakukan analisis dampak FTAAP oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sangat diperlukan (Kemendag 2016). Idealnya, Indonesia harus menjadi bagian dari FTAAP, mengingat perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik itu baru akan terwujud di masa mendatang. Indonesia masih mempunyai cukup waktu untuk memperbaiki dan mempersiapkan diri. FTAAP juga perlu menjadi inspirasi bagi penetapan *roadmap* menuju Indonesia yang berdaya saing tinggi. Meskipun demikian, Pemerintah tetap perlu berhati-hati dalam menyepakati perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik agar tidak merugikan kepentingan nasional.

Kerja sama lainnya di kawasan Asia-Pasifik yang memiliki prospektif adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). RCEP merupakan kesepakatan perdagangan bebas yang digagas oleh sepuluh negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Phillipina, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, Brunei, Singapura) dengan enam negara mitra strategis, yakni Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Adapun tujuan utama dari pendirian RCEP adalah untuk memperluas dan mempererat basis kerja sama ekonomi diantara negara-negara yang terlibat, dalam bingkai pengembangan pasar bebas (*free trade area*) di kawasan Asia-Pasifik (APEC 2018)

Indonesia sebagai salah satu negara pelopor RCEP melihat kesepakatan tersebut sebagai salah satu pendorong bagi kemajuan ekonomi nasional. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kolaborasi dari 16 negara anggota RCEP akan memberikan kontribusi *Gross Domestic Product* (GDP) lebih dari US\$ 20 triliun atau setara dengan 30% dari total GDP global. Selain itu, total populasi dari seluruh negara yang terlibat dalam RCEP tidak kurang dari 3 miliar jiwa atau lebih dari 45% jumlah populasi dunia pada 2014. Sementara, total perdagangan antarnegara yang tergabung dalam RCEP sekitar US\$ 10,8 triliun atau lebih dari 28% perdagangan global. Di sisi lain, investasi

dengan skema *Foreign Direct Investment* (FDI) yang mengalir menuju negara anggota RCEP tercatat sebesar US\$ 366,3 miliar atau tidak kurang dari 29% dari FDI global (Şincai 2017; La 2017).

Kesepakatan kerja sama RCEP meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi, kerja sama operasional, kerja sama dalam pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*), kerja sama antarinstitusi pemerintahan, pengembangan iklim investasi yang mendukung pembangunan perekonomian negara-negara anggota, serta kerja sama lain yang saling menguntungkan. Dalam hal kerja sama perdagangan, fokus utama dari RCEP adalah mengeliminasi hambatan tarif dan nontarif (*tariff and non-tariff barriers*), baik dalam perdagangan barang maupun jasa. Kerja sama perdagangan tersebut akan tetap berada dalam koridor kesepakatan kerja sama internasional yang telah disetujui dalam WTO, utamanya yang tertuang dalam *the General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *the General Agreement on Trade in Services* (GATS). Sementara menyangkut hak atas kekayaan intelektual, RCEP juga selaras dengan kesepakatan WTO yang dinyatakan dalam *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* /TRIPS (Hsieh 2017; Roessler 2017).

Meskipun peluang kerja sama pertanian di kawasan Asia Pasifik sangat besar, namun dengan melesunya kondisi ekonomi dunia beberapa tahun terakhir turut memengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut (Tam 2018). Paling tidak ada dua peristiwa politik penting dalam perkembangan agenda perdagangan global di tahun 2016 yang menjadi perhatian besar masyarakat dunia, yaitu: *pertama*, keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit); dan *kedua*, Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, menolak Perjanjian TPP (Planifolia 2017). Dua peristiwa ini membawa tren perdagangan global mengarah pada penguatan praktek proteksionisme.

Laporan International Monetary Fund (IMF) per Oktober 2016 juga menyebutkan bahwa pascakrisis keuangan tahun 2008, pertumbuhan perdagangan global terus mengalami perlambatan dan hanya tumbuh kurang dari 1,0% per tahun. Pelemahan pertumbuhan perdagangan global ini sangat memengaruhi paling tidak 34 dari kinerja investasi global. Menurut Allee dan Elsig (2015), faktor utama yang turut memengaruhi perlambatan pertumbuhan perdagangan global adalah kemunduran dalam liberalisasi perdagangan dan peningkatan aksi proteksionisme.

Penguatan aksi proteksionisme terus meningkat pascakrisis keuangan pada 2008. Hal ini juga dibuktikan dari Laporan WTO tahun 2016 yang menyebutkan bahwa terjadi peningkatan atas tindakan pembatasan perdagangan dari 2010 hingga 2015.

Tindakan pembatasan perdagangan pada 2010 hanya 546 tindakan dan melonjak hingga 2.557 pada tahun 2015. Namun, dari total tindakan pembatasan ini, hanya sekitar 642 tindakan yang pada akhirnya dihapuskan sehingga sisa total tindakan pembatasan perdagangan yang masih berlaku sebanyak 1915 tindakan atau 79% dari total tindakan. Tindakan pembatasan perdagangan paling banyak adalah terkait dengan tindakan di balik perbatasan (*behind the borders*) atau dalam bentuk nontarif, seperti penerapan kebijakan, subsidi, dan isu teknis atau aturan kesehatan, serta standar produk, termasuk penerapan *trade remedies* (*anti-dumping, countervailing duties*, dan tindakan *safeguard*). Bentuk lainnya adalah penerapan *Sanitasi and phytosanitary* ataupun *Technical barriers to trade*. Penguatan tindakan proteksi ini mendorong terjadinya peningkatan sengketa perdagangan di WTO (WTO 2016; Gnangnon 2018).

Terhitung sejak 1995 hingga 2015, total sengketa perdagangan yang masuk ke WTO (*Dispute Settlement Body*) sebanyak 500 kasus. Isu perjanjian yang paling banyak dimintakan konsultasi oleh para pihak yang bersengketa adalah *anti-dumping* 112 kasus, *subsidies and counter vailing measures* sebanyak 108 kasus, pertanian 73 kasus, *technical barriers to trade* 49 kasus, *safeguard* 47 kasus, *import licensing* 44 kasus, dan SPS 43 kasus. Pada 2015 terhitung ada 13 sengketa yang masuk dan terbentuk sebanyak 15 Panel DSB WTO serta dikeluarkannya 11 Panel Report atas sengketa yang masuk. Indonesia sendiri memiliki total 23 sengketa yang dibawa ke WTO sejak tahun 1995 hingga tahun 2015, yang 10 diantaranya sebagai *complainant* atau penuntut dan 13 sisanya sebagai *respondent* (WTO 2016)

Di tengah ketidakpastian ekonomi global akan menjadi masa-masa sulit bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik (Pradhan et al. 2015; Andreasson et al. 2016; Tam 2018). Laporan Perkembangan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik yang disusun oleh Bank Dunia (2016) memperkirakan Tiongkok akan terus melakukan transisi ke pertumbuhan yang lebih lambat, namun tetap berkelanjutan dari 6,7% pada 2015 menjadi 6,5% pada 2017 dan 6,3% pada 2018. Untuk negara lain di kawasan tersebut, pertumbuhan diproyeksikan 5,0% pada 2017 dan 5,1% pada 2018. Angka ini melambat

dibanding pertumbuhan pada 2015 yang mencapai 6,5%. Konsekuensi dari situasi tersebut adalah menurunnya permintaan impor atas produk-produk pertanian. Negara-negara penghasil komoditas, seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand akan terkena dampak cukup signifikan dari melesunya ekonomi di kawasan Asia-Pasifik (World Bank 2018).

Dengan memperhatikan kondisi ekonomi global tersebut, Indonesia perlu memaksimalkan kerja sama regional seperti ASEAN dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur. Dua kerja sama regional tersebut adalah arena diplomasi Indonesia dalam menghubungkan dan memperjuangkan kepentingan pertanian nasional, terutama terkait perkembangan ekonomi nasional dan kawasan. Indonesia bisa aktif untuk memaksimalkan kerja sama pertanian di ASEAN dengan melakukan akselerasi kinerja sektor pertanian ASEAN yang komplementer satu dengan yang lainnya sehingga mampu secara bersama-sama menguasai pasar pertanian global yang lebih besar.

Kerja sama lainnya adalah membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antarnegara ASEAN sehingga mendukung kegiatan perdagangan dan investasi pertanian di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur (Itakura 2014). Dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi di China akan menjadi faktor pendorong utama bagi Indonesia untuk memperluas dan memperdalam kerja sama di bidang pertanian dengan negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, khususnya negara-negara yang ekonominya sedang berkembang, seperti Australia, India, dan Rusia. Dalam hal ini Indonesia perlu melakukan perluasan dan pendalaman pasar atas produk-produk pertanian di negara-negara tersebut.

Besarnya pasar domestik juga bisa menjadi alternatif untuk pelaku bisnis dan pemerintah Indonesia dalam rangka memberdayakan potensi pertanian secara internal dari melesunya ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Saat bersamaan, Indonesia tetap berusaha menggali potensi pasar untuk produk pertanian di negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Indonesia wajib memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan daya saing produk (barang dan jasa) supaya lebih kompetitif. Keunggulan ini dapat tercapai bila Indonesia mampu menghasilkan karya bermutu. Indonesia bisa tergilas berbagai produk impor dari negara Asia Tenggara dan Asia Timur dan hanya menjadi penonton atas banjirnya produk impor ke pasar dalam negeri apabila daya saing produk negara ini lemah. Karya bermutu bisa

dihasilkan jika dapat memenuhi atau melebihi persyaratan untuk menembus pasar global, melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan serta berdaya saing dalam globalisasi perdagangan termasuk standarisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pemberdayaan pasar domestik dan kegiatan ekspor ke negara-negara ASEAN dan Asia Timur yang sedang berkembang. Langkah-langkah tersebut perlu diimbangi dengan penurunan impor dan pemberdayaan produk dalam negeri.

Dalam rangka memanfaatkan dinamika ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dan potensi ekonomi domestik, Indonesia perlu melakukan perubahan konkret yang *gradual* dari produsen produk pertanian primer menjadi penghasil produk-produk inovatif dan kompetitif. Untuk itu, Indonesia perlu fokus pada upaya peningkatan kapasitas produksi, peningkatan keragaman variasi produk turunan serta peningkatan kedalaman tingkat hilirisasi produk pertanian. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya, antara lain:

- (1) Membangun kapasitas produksi pangan yang diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani. Artinya, upaya peningkatan produksi yang bertumpu pada peningkatan produktivitas dan indeks tanam harus dibarengi dengan upaya peningkatan pendapatan petani dan meminimalisasi pengeluaran biaya usaha tani yang menyebabkan inefisiensi;
- (2) Membangun daya tahan (*resilience*) usaha tani dalam menghadapi risiko perubahan iklim, bencana alam, dan ketidakpastian pasar, antara lain melalui sistem asuransi pertanian, perbankan pertanian, dan pengelolaan gejolak harga pangan (*management of market volatility*);
- (3) Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber daya lahan melalui reforma agraria atau pemanfaatan lahan telantar dengan dukungan permodalan dan subsidi harus menjadi salah satu prioritas dalam upaya peningkatan kapasitas produksi pangan nasional;
- (4) Meningkatkan kemampuan teknologi industri hilirisasi dengan melakukan *industrial upgrading* secara bertahap dengan meningkatkan struktur *endowment* (modal dan tenaga kerja), mengembangkan hilirisasi yang bersifat *Comparative Advantage Following* (CAF), mendorong investasi asing masuk di sektor hilirisasi terutama yang membutuhkan *intensif capital* dan *advance technology* untuk

- membawa sektor hilirisasi masuk ke pasar internasional, membangun SDM, serta melakukan transfer ilmu pengetahuan;
- (5) Memperluas rantai pasokan (*expansion of supply chain*), jaringan perdagangan (*trading networks*), dan membangun kerja sama regional dan internasional terkait dengan masalah global seperti perubahan iklim, *sustainability*, perdagangan, dan koherensi regulasi sehingga pasar global dapat berfungsi dengan baik;
  - (6) Membangun infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi sistem produksi, *value chain*, sistem transportasi domestik, aksesibilitas, serta meningkatkan koneksi ke pasar internasional;
  - (7) Penetapan standar nasional yang sesuai dengan standar internasional serta penguatan infrastruktur standarisasi, seperti menyiapkan laboratorium uji berstandar internasional;
  - (8) Memperkuat kelembagaan untuk menumbuhkembangkan kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial guna meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha pertanian. Kelembagaan pertanian yang solid dan terkoordinasi dengan baik adalah salah satu kunci penguatan posisi petani dalam mewujudkan produk-produk pertanian inovatif dan kompetitif di pasar global.

#### ARAH KEBIJAKAN KERJA SAMA INTERNASIONAL PERTANIAN

Dengan memperhatikan kondisi ekonomi global serta kesiapan pertanian Indonesia maka kerja sama di kawasan Asia-Pasifik perlu dioptimalkan. Untuk itu, dibutuhkan adanya strategi mencakup empat hal yang saling terkait, yakni bagaimana meningkatkan akses pasar komoditas pertanian, meningkatkan investasi, mengembangkan kerja sama teknik (*technical cooperation*), serta penguatan fungsi diplomasi pertanian sebagai faktor pelancar Indonesia dalam menghadapi berbagai kerja sama internasional saat ini dan ke depan.

#### Peningkatan Akses Pasar

Bergabungnya pertanian Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional membutuhkan pertimbangan, perencanaan, dan upaya konkret yang matang. Dari pengalaman selama ini menunjukkan bahwa daya saing

komoditas pertanian yang cukup baik masih terbatas pada komoditas perkebunan, sedangkan komoditas lain baru pada tahapan keunggulan (daya saing) potensial. Karena itu, diperlukan adanya strategi peningkatan daya saing melalui pengembangan komoditas yang terintegrasi dalam skema *global value chain*, pengembangan kluster dari hulu ke hilir, peningkatan keragaman variasi produk turunan, peningkatan kedalaman tingkat hilirisasi, perubahan teknologi, penguatan *branding*, dan strategi pemasaran yang sesuai.

Indonesia juga perlu memperhatikan peluang *niche market*. Kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik telah membuka peluang *niche market* komoditas pertanian. Di samping itu, perlu lebih diintensifkan untuk memanfaatkan kerja sama di kawasan Asia Pasifik dengan cara, antara lain: (1) memperluas dan memperdalam kerja sama pertanian dengan negara-negara yang ekonominya sedang berkembang, seperti Australia, India, dan Rusia; (2) menggali potensi pasar-pasar nontradisional untuk produk pertanian Indonesia, seperti negara non-Uni Eropa; Skandinavia, Turki, Kanada, Meksiko, Swedia, Panama, Portugal, serta Irlandia untuk peningkatan nilai perdagangan dan investasi bagi Indonesia; dan (3) mengembangkan pasar alternatif bagi produk ekspor pertanian Indonesia di kawasan Amerika Latin serta Eropa Timur dan Tengah.

#### Pengembangan Investasi

Peluang investasi sektor pertanian di Indonesia baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih cukup besar. Perkembangan investasi pertanian tercatat dari Rp29,30 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp45,9 triliun pada tahun 2017 atau naik sekitar 56,7% (Kementan 2017). Dengan kata lain rata-rata kenaikan per tahun investasi pertanian sekitar 14,2%. Untuk menciptakan suatu iklim investasi, diperlukan suatu strategi yang dapat menawarkan insentif untuk menarik minat para investor.

Dari banyak kasus pemberian insentif bagi investor, pemerintah memberikan keringanan pajak dan atau bentuk insentif materil lainnya. Disamping insentif dalam bentuk materil, insentif lain juga diperlukan agar investor tertarik untuk mengembangkan pertanian di Indonesia. Beberapa insentif investasi yang perlu diberikan, antara lain: (1) kemudahan dan percepatan proses perijinan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di kabupaten; (2) kepastian waktu penyelesaian setiap tahapan proses perijinan,

baik di pusat, provinsi, maupun di kabupaten; (3) transparansi dalam regulasi; dan (4) jaminan keamanan berinvestasi, termasuk terkait dengan regulasi/kebijakan pemerintah.

### Optimalisasi Kerja Sama Teknik

Peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama teknik memerlukan formulasi kebijakan yang terintegrasi agar kontribusi yang diberikan tidak hanya menjadi *charity*, tetapi lebih pada memperjuangkan kepentingan sesama negara dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan sejajar serta saling menguntungkan. Kerja sama teknik diharapkan dapat menjadi investasi politik dan instrumen diplomasi Indonesia, termasuk dalam mendorong diplomasi ekonomi tanpa menghilangkan esensi solidaritas sesama negara berkembang. Untuk itu, strategi kebijakan kerja sama teknik, khususnya di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik, antara lain;

1. Penyusunan sebuah cetak biru kerja sama teknik pertanian Indonesia yang di dalamnya tercakup visi, misi dan identifikasi target-target kepentingan nasional yang hendak dicapai;
2. Diperlukan mekanisme koordinasi yang intensif di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, dan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama teknik;
3. Terus mendorong pembiayaan kerja sama teknik melalui mekanisme *triangular* selaras dengan prinsip-prinsip dalam kesepakatan-kesepakatan internasional terkait;
4. Mendorong keterlibatan swasta dan lembaga nonpemerintah dalam program kemitraan kerja sama teknik melalui skema-skema *public-private partnership*;
5. Mengaitkan kerja sama teknik dengan upaya pemasaran produk-produk pertanian unggulan Indonesia ke negara-negara berkembang;
6. Pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani kerja sama teknik;

### Penguatan Fungsi Diplomasi Pertanian

Dengan makin terbukanya ekonomi Indonesia dan secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kerja sama internasional, baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun

multilateral maka penguatan diplomasi pertanian menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kepentingan pertanian nasional dengan cara yang baik. Karena itu, upaya penguatan peran dan fungsi atase pertanian dan perwakilan Indonesia dalam diplomasi pertanian merupakan suatu kenisyaan dalam proses negosiasi dan pembuatan kebijakan pertanian, baik di kawasan Asia Pasifik maupun di tataran global.

Atase Pertanian dan perwakilan Indonesia harus memiliki kemampuan *market intelligence* untuk melihat potensi dan peluang kerja sama di negara akreditasinya. Para atase pertanian dan perwakilan Indonesia juga dituntut untuk bisa menjalankan perannya sebagai *trade policy intelligence*. Hal ini dilakukan dengan cara pengamatan terhadap kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah setempat dan menyampaikan saran kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Jika kepentingan pertanian Indonesia berpotensi terancam dengan kebijakan tersebut, para atase pertanian dan perwakilan Indonesia harus dapat berperan sebagai negosiator untuk membela kepentingan pertanian Indonesia.

Di bidang perdagangan, diplomasi pertanian hendaknya difokuskan pada upaya untuk membidik pasar nontradisional bagi produk-produk ekspor pertanian dari Indonesia. Selama ini, ekspor dari Indonesia cenderung terfokus pada pasar-pasar tradisional, seperti Jepang, Amerika, Singapura, Taiwan, Korea, serta negara-negara di kawasan Eropa Barat, seperti Jerman, Belanda, Inggris, Perancis, serta Italia. Sementara pasar-pasar nontradisional seperti negara non-Uni Eropa; Skandinavia, Turki, Kanada, Meksiko, Swedia, Panama, Portugal, serta Irlandia juga berpotensi bagi produk ekspor pertanian Indonesia. Negara-negara lainnya di kawasan Amerika Latin, Eropa Timur dan Tengah juga berpotensi menjadi pasar alternatif bagi pasar ekspor pertanian Indonesia.

Diplomasi pertanian juga harus mampu mengurangi tekanan *proxy war* terhadap kelapa sawit dan sekaligus meningkatkan peran sawit sebagai industri strategis untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan energi terbarukan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah mengusahakan agar kegiatan penanaman sawit masuk dalam kategori tanaman hutan sesuai definisi FAO. Hal ini penting karena *family* kelapa termasuk dalam tanaman hutan menurut definisi FAO 2010. Dalam konteks kedaulatan pangan, diplomasi pertanian dalam ranah regional hendaknya difokuskan untuk membangun kerja sama regional dalam mencegah minimnya pasokan pangan terutama

di kawasan Asia Pasifik. Kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan negara-negara produsen pangan strategis terutama negara-negara berkembang seperti Thailand, Vietnam, India, dan Brazil, dengan melakukan tukar-menukar teknologi pengolahan bahan-bahan pangan, memberdayakan para produsen pangan, kerja sama perdagangan pangan dan lainnya.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Uraian diatas telah menunjukkan bahwa kerja sama internasional di kawasan Asia Pasifik yang dilakukan Indonesia selama ini telah memberikan kontribusi terhadap makin terbukanya pasar ekspor pertanian Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Selain komoditas perkebunan, banyak hasil-hasil pertanian lainnya, seperti beras organik, beras ketan hitam, singkong, buah manggis, sayuran, anggrek, krisan, telur tetas, serta produk pangan asal hewan (susu, bakso, *artificial flavour*, makanan/minuman yang mengandung telur) sudah mulai diekspor ke berbagai negara di kawasan Asia Pasifik. Potensi untuk menciptakan peluang baru serta pasar baru produk-produk pertanian Indonesia di kawasan Asia Pasifik masih sangat tinggi. Kerja sama yang telah berjalan di kawasan Asia Pasifik selama ini tidak hanya dalam perdagangan dan investasi tetapi juga dalam bentuk kerja sama teknik.

Dengan makin terbukanya peluang kerja sama internasional di kawasan Asia Pasifik, sektor pertanian Indonesia harus dipersiapkan dengan melakukan banyak pembenahan terutama difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas produksi, peningkatan keragaman variasi produk turunan, serta peningkatan kedalaman tingkat hilirisasi produk pertanian. Indonesia juga perlu membangkitkan kembali peran sektor pertanian dengan dukungan politik yang kuat melalui peran konkret untuk melindungi hak kepemilikan pelaku agribisnis (kecil – menengah – besar) melalui legislasi dan regulasi. Strategi kebijakan lainnya adalah mengupayakan untuk meningkatkan kemampuan daya saing pertanian secara terstruktur dan komprehensif. Selain itu, peran dan fungsi diplomasi pertanian perlu terus diperkuat sehingga mampu memberikan sumbangsih besar dalam peningkatan kinerja sektor pertanian nasional baik dalam ranah bilateral, regional, maupun dalam ranah global. Diplomasi pertanian akan menjadi sangat sentral sebagai perpanjangan kepentingan

nasional pada proses negosiasi dan pembuatan kebijakan pertanian, baik di kawasan Asia Pasifik maupun di tataran global.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dr. Reni Kustiari, peneliti dari Kelompok Peneliti Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional Pusat Sosial dan Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Dr. Harjito dari Biro Kerja sama Luar Negeri Kementerian Pertanian, Batara Siagian, SP, MAB dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, yang semuanya telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis terkait substansi tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allee T, Elsig M. 2015. Dispute settlement provisions in PTAs. In: Dur A and Elsig M, editors. Trade cooperation: the purpose, design and effects of preferential trade agreements. Cambridge (GB): Cambridge University Press.
- Alvian RA, Putri GC, Ardhani I. 2018. Haluan baru politik luar negeri Indonesia: perbandingan diplomasi 'middle power' Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. *J Hub Int.* 6( 2): 151-168.
- Anam S. 2014. Great power rivalry in a New Asia Pacific Order: examining the great power concert model for Asia Pacific. *J Hub Int.* 3(2): 125-130.
- Andika MT. 2016. An Analysis of Indonesia foreign policy under Jokowi's pro-people diplomacy. *Indonesian Perspect.* 1(2): 1-13.
- Andreasson, Bekiros S, Nguyen DK, Uddin GS. 2016. Impact of speculation and economic uncertainty on commodity markets. *Int Rev Financial Anal.* 43: 115-127.
- [APEC] Asia Pasific Economic Cooperation. 2018. APEC regional trends analysis trade, policy, and the pursuit of inclusion. Singapore (SG): Asia-Pacific Economic Cooperation Secretariat Singapore.
- Arifin B. 2011. Bioteknologi dan peningkatan kapasitas produksi. analisis ekonomi KOMPAS [Internet]. [cited 2018 Mei 5]. Tersedia dari: <https://regional.kompas.com/read/2011/10/24/05001242/Bioteknologi.dan.Peningkatan.Produksi>.
- [ASEAN] Association of Southeast Asian Nations. 2017. A Journey towards regional economic integration : 1967 – 2017. Jakarta (ID): The ASEAN Secretariat

- Auzina-Emsina A. 2014. Labour productivity, economic growth and global competitiveness in post-crisis period. *Procedia Soc Behav Sci.* 156: 317-321.
- Bano S, Takahashi Y, Scrimgeour F. 2013. ASEAN-New Zealand trade relations and trade potential: evidence and analysis. *J Econ Integr.* 28(1): 144-182.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014a. Angka pencacahan lengkap hasil ST 2013. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014b. Potensi pertanian Indonesia-analisis hasil pencacahan lengkap ST2013. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik Jakarta.
- Burton JW. 1972. *World society.* Cambridge (GB): Cambridge University Press
- Davies M, Harris-Rimmer S. 2016. Assessing Indonesia's normative influence: wishful thinking or hidden strength: Indonesia's normative influence. *Asia Pacific Policy Stud.* 3(1): 83-91.
- Egberink F, van der Putten FP. 2010. ASEAN and strategic rivalry among the great powers in Asia. *J Curr Southeast Asian Affairs.* 9(3): 131-141.
- Fealy G, White H. 2016. Indonesia's "great power" aspirations: a critical view. *Asia Pacific Policy Stud.* 3(1):, 92-100.
- [FAO] The Food and Agriculture Organization. 2017. *The Future of food and agriculture-trends and challenges. Annual Report 2017.* Rome (IT): The Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Gnagnon SK. 2018. Multilateral trade liberalization and economic growth. *J.Econ Integr.* 33(2): 1261-1301.
- Hermanto, Kustiari R, Agustian A, Kristyantoadi S, Syahyuti, Yusuf ES. 2017. *Kesiapan pertanian Indonesia dalam kerja sama internasional di Kawasan Asia Pasifik.* Jakarta (ID): Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Hidetaka Y. 2005. Political leadership, informality, and regional integration in East Asia: the evolution of ASEAN plus three. *European J of East Asia Stud.* 4(2): 205-232.
- Holsti KJ. 1994. *International politics, a framework for analysis (7th Edition).* New Jersey (US): Prentice-Hall
- Hsieh PL. 2017. *The RCEP, New Asian regionalism and the global south.* Institute for International Law and Justice (IILJ) New York. Working Paper 2017/4 MegaReg Series.
- [IMF] International Monetary Fund. 2016. *IMF Annual Report 2016: Finding solution together.* Washington, DC (US): IMF International Monetary Fund.
- Itakura K. 2014. Impact of liberalization and improved connectivity and facilitation in ASEAN. *J Asian Econ.* 35: , 2-11.
- Kauffman N. 2013. *Financing young and beginning farmer.* Main Street Econ. Issue 2.
- [Kemendag] Kementerian Perdagangan. 2016. *Free trade area of Asia Pasific & ASEAN.* Warta Ekspor Edisi Juli 2016. Jakarta (ID): Kementerian Perdagangan.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2017. *Statistik pertanian 2017.* Jakarta (ID): Kementerian Pertanian.
- [KRKP] Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. 2015. *Laporan Kajian regenerasi petani pada keluarga petani padi dan hortikultura.* Jakarta (ID): KRKP.
- La M. 2017. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): progress and challenges. *World Econ Brief.* 7(12): 1-5
- Murphy D. 2012. *Young farmer finance. A Report for Nuffield Australia farming Scholars.* Nuffield Australia Project No. 1203. North Victoria (AU): Nuffield Australia.
- Nabs-Keller G. 2013. Reforming Indonesia's foreign ministry: ideas, organization and leadership. *Contemporary Southeast Asia.* 35(1): 56-82.
- Orcalli G. 2017. Market building through regional integration agreements: The EU and the ASEAN way. *J Econ Integr.* 32(1): 160-192.
- Planifolia V. 2017. Strategi rebalancing Amerika Serikat di kawasan Asia-Pasifik. *J Hub Int.* 6(1): 16-26
- Powers K, Goertz G. 2011. The Economic-institutional construction of regions: conceptualisation and operationalisation. *Rev Int. Stud.* 37: 2387-2416
- Pradhan RP, Arvin MB, Ghoshray A. 2015. The Dynamics of economic growth, oil prices, stock market depth, and other macroeconomic variables: evidence from the G-20 countries. *Int Rev Financial Anal.* 39: 84-95.
- Roessler F. 2017. *Dispute Settlement in the WTO.* In: M. Elsig, B. Hoekman and Pauwelyn J, editors. *Assessing the World Trade Organization: fit for purpose?.* Cambridge (GB): Cambridge University Press.
- Samphantharak K. 2011. The Rise of China and foreign direct investment from Southeast Asia. *J Curr Southeast Asian Affairs.* 30(2): 65-75.
- Sangit DS. 2012. Alliances in international relations theory. *Int J SocInterdisiplin Res.* 1(8): 224-237.
- Santikajaya A. 2016. Walking the middle path: the characteristics of Indonesia's rise. *Canada's J Glob Policy Anal.* 71(4): 563-586.
- Schouenborg L, Buzan B. 2018. *Global international society: a new framework for analysis.* Cambridge (GB): Cambridge University press.



- Şincai LO. 2017. The Actual balance of power in asia-pacific: determinants, characteristics, and new trends. *Academic J Econ Stud.* 3(3): 62-72.
- Sumaryanto, Hermanto, Ariani M, Suhartini SH, Yofa RD, Azahari DH. 2015. Pengaruh urbanisasi terhadap suksesti sistem pengelolaan usaha tani dan implikasinya terhadap keberlanjutan swasembada pangan. Laporan Akhir Penelitian. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Tam PS. 2018. Global trade flows and economic policy uncertainty. *Appl Econ.* 50(34-350: 3718-3734.
- Uchiyama T. 2014. Recent trends in young people's entry into farming in Japan: an international perspective. FFTC-RDA 2014 International Seminar on Enhanced Entry of Young Generation into Farming; 2014 Oct 20-24; Jeonju, Korea.
- White B. 2011. "Who will own the countryside? Dispossession, rural youth and the future of farming". Valedictory Lecture, 13 Oktober 2011. Rotterdam (NL): Erasmus University Rotterdam.
- Winarno B. 2014. Globalisasi dan rezim demokrasi poliarki: kebijakan integrasi ekonomi Indonesia. *J Hub Int..* 3(1): 1-12.
- The World Bank. 2018. Pertumbuhan stabil di Asia Timur dan Pasifik di Tahun 2016-18: Bank Dunia [Internet]. [cited 2018] . Available from: <http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/04/world-bank-stable-growth-outlook-for-east-asia-pacific-in-2016-18>.
- [WTO] The World Trade Organization. 2016. WTO Annual Report 2016. Geneva (CH): The World Trade Organization.